BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Bandung

4.1.1 Sejarah Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten bandung hingga tahun 1681. Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daearh Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Asia Afrika - Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya.

Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808/awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekali lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang). Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding

father) kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

Visi Pemerintah Kota Bandung Adalah **"Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat Dan Bersahabat)".**

Untuk Merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :

1. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa;
2. Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya;
3. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan - aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota .
4. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau haraga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya. Jadi kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Misi Pemerintah Kota Bandung Adalah:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat

dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.

4. Meningkatkan penataan Kota , yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota .
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota , mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Struktur organisasi Pemerintah Kota Bandung berdasarkan PP No 41/2007 adalah sebagai berikut :

1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Staf Ahli
4. Sekretariat Daerah
5. Sekretariat DPRD
6. RSUD
7. Dinas

a. Dinas Bina Marga dan Pengairan

b. Dinas Kebakaran

c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

d. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

e. Dinas Kesehatan

f. Dinas Komunikasi dan Informatika

g. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan

h. Dinas Pemakaman dan Pertamanan

i. Dinas Pemuda dan Olah Raga

j. Dinas Pendapatan

k. Dinas Pendidikan

l. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

m. Dinas Perhubungan

n. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

o. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

p. Dinas Tenaga Kerja

8. Lembaga Teknis Daerah

9. Satpol PP

10. Kecamatan dan Kelurahan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung.

4.1.3 Job Description

1. Dinas Bina Marga dan Pengairan

   Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum yang mempunyai fungsi Merumuskan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum kebinamargaan, Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pekerjaan umum kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pemeliharaan dan logistic, Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta kepegawaian dinas.

2. Dinas Kebakaran

   Melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi : pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, pengendalian operasional, yang mempunyai fungsi Merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penangulangan kebakaran, Melaksanakan tugas teknis operasional dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Melaksanakan pelayanan teknis administrative meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pengembangan serta administrasi keuangan.

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

   Merencanakan, Membina, Mengkoordinasikan, Mengevaluasi Dan Mengendalikan Kegiatan Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Bidang : Sarana Wisata, Objek Wisata, Pemasaran Pariwisata, Kebudayaan , Kesenian, Ketatausahaan Dinas.

4. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, kependudukan dan pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi pemulihan sosial, pembinaan kesejahteraan sosial, usaha kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, pendaftaran penduduk, informasi administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

5. Dinas Kesehatan

   Melaksanakan Bagian Kewenangan Daerah Dalam bidang Kesehatan.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika

   Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

7. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan

   Melaksanakan urusan pemerintah dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

8. Dinas Pemakaman dan Pertamanan

   Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pertamanan dan fasilitas sosial dan Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Walikota.

9. Dinas Pemuda dan Olah Raga

   Melaksanakan urusan pemerintah dibidang Pemuda dan Olah Raga.

10. Dinas Pendapatan

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung.

11. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang Pendidikan, yang berfungsi Perumusan kebijakan teknis pada bidang pendidikan dan Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan.

12. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Melaksanakan urusan pemerintah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

13. Dinas Perhubungan

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pertanian yang mempunyai fungsi Merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian, Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pertanian dan Melaksanakan pelayanan teknis administrasi.

15. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Dinas Tata Kota memberikan pelayanan kepada masyarakat, swasta dan pemerintah dalam Pemberian informasi rencana kota, Survey dan perencanaan trase jalur jalan, jembatan, saluran dan utilitas, Cetak ulang peta, Pengukuran situasi tanah, Pematokan untuk penerapan rencana kota,

Penetapan lokasi penggunaan tanah bagi rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah , Pemberian Izin Lokasi, Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

16. Dinas Tenaga Kerja

Melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang ketenagakerjaan yang mempunyai fungsi Merumuskan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, Melaksanakan tugas teknis operasional bidang tenaga kerja yang meliputi : Penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, Pembinaan hubungan industrial dan jamsostek, pengawasan ketenagakerjaan, Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan program.

4.1.4 Aktivitas Pemerintah Kota Bandung

Ada Beberapa Stategi-strategi yang di terapkan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bandung di antaranya sebagai berikut :

A. Stategi Dalam Rangka Mengembangkan Sumber Daya manusia yang Handal dan Religius

1. Kebijakan Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan serta pelayanan keagamaan baik seluruh masyarakat.

   a. Program-program pembangunan

   b. Program Pendidikan dasar Pra Sekolah

c. Program Pendidikan Menengah

d. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

e. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi

f. Program Lingkungan sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.

g. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

h. Progarm Pengawasan Obat, Makanan, dan Bahan Berbahaya

i. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

j. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

B. Stategi Dalam Rangka Mengembangkan Perekonomian Kota yang Adil

1. Kebijakan : Mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota yang berbasiskan potensi daerah.

a. Program-program pembangunan

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi

e. Program Pembinaan Usaha Kecil

f. Program Peningkatan Investasi Kota

g. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

h. Program Pengembangan Produk Keparawisataan

i. Program Pengembangan Agrobisnis

C. Stategi Dalam Rangka Mengembangkan Sosial Budaya Kota Yang Ramah dan Berkesadaran serta Berhati Nurani

1. Kebijakan Mendorong Peningkatan integrasi, ketahanan dan kepedulian sosial masyarakat.
2. Program-program pembangunan
    a. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamanan, dan Kerukunan Hidup Umat beragama
    b. Program Pembinaan, Pengembangan Produktifitas dan perlindungan Tenaga Kerja
    c. Program pelayanan, Rehabilitasi dan Partisipasi Sosial
    d. Program Pemberdayaan Perempuan
    e. Program Pelayanan Kependudukan
    f. Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
    g. Program Pengembangan Seni Budaya Daerah

D. Stategi Dalam Rangka Meningkatkan Penataan Kota

1. Kebijakan Mengungkapkan peruasan dan penetapan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
    a. Program-program pembangunan
    b. Program Pengembangan Kawasan Gedebage
    c. Program Penataan Prasarana dan Sarana
    d. Program Penataan Transportasi Kota
    e. Program Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

f. Program Penataan Lingkungan Permukiman

g. Program Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah

h. Program Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Pemerintah Kota

E. Stategi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Secara Efektif, Efesien, Transparan dan Akuntabel

1. Kebijakan Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan , pelaksanaan serta pengendalian pengawasan pembangunan kota.

2. Program-program pembangunan

   a. Program Peningkatan Perencanaan Kota

   b. Program Peningkatan Hukum

   c. Program Peningkatan Prasarana dan sarana aparatur Pemerintah Kota

   d. Program Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota

   e. Program Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

   f. Program Peningkatan Kualitas Pengawasan

   g. Program Pelayanan Prima

   h. Program Peningkatan Partisipasi Politik

   i. Program Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dan Kota

   j. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

F. Stategi Dalam rangka Mengembangkan Sistem Keuangan Kota

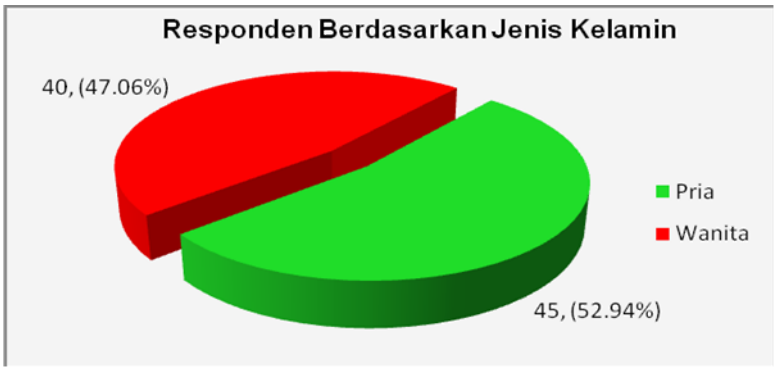
1. Kebijakan Mendoronga sistem keuangan kota yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Program-program pembangunan
   a. Program Peningkatan Sistem Pembiayaan pembangunan
   b. Program Peningkatan Kinerja BUMD
   c. Program Pengembangan Kemitraan

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari aparat pada dinas yang ada di Kota Bandung yaitu sebanyak 85 orang. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut:

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini:

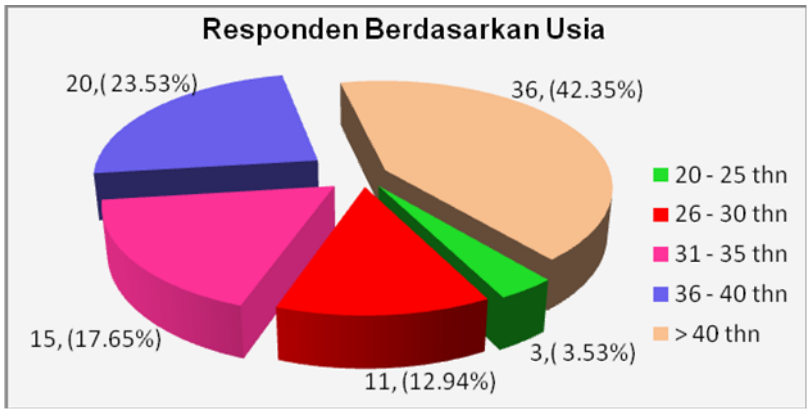


Gambar 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui profil aparat pada dinas yang ada di Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 52,94% dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 47,06%, jadi responden paling banyak adalah pria.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Profil responden berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini:

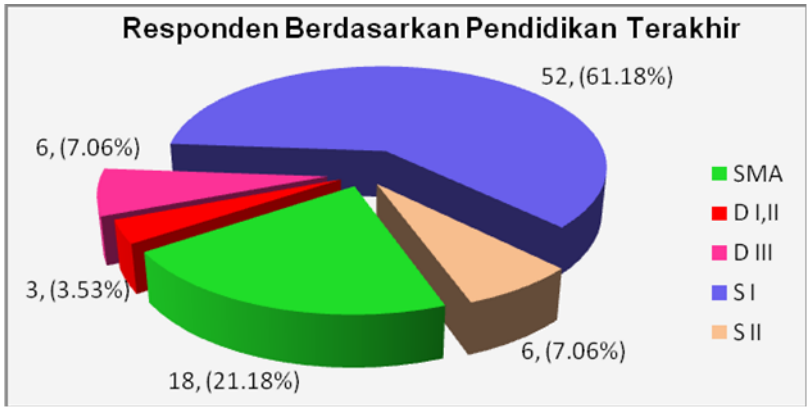


Gambar 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui usia aparat pada dinas yang ada di Kota Bandung. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden paling banyak yang berusia lebih dari 40 tahun yaitu sebesar 42,35% lalu yang berusia antara 36 sampai dengan 40 tahun yaitu sebesar 23,53% sedangkan sisanya berusia 20 sampai dengan 25 tahun, berusia 26 sampai dengan 30 tahun dan yang berusia 31 sampai dengan 35 tahun total sebesar 34,12%.

c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini:

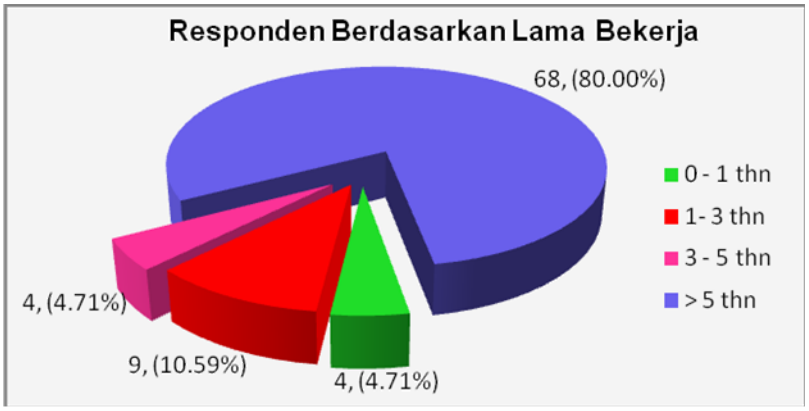


Gambar 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui pendidikan terakhir aparat pada dinas yang ada di Kota Bandung. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan terakhir S1 sebesar 61,18%, responden yang berpendidikan terakhir SMA sebesar 21,18% dan responden yang berpendidikan terakhir S2 hanya sebesar 7,06%. Jadi responden paling banyak adalah yang berpendidikan terakhir S1.

d. Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Profil responden berdasarkan lamanya bekerja dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini:



Gambar 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui lama bekerja aparat pada dinas yang ada di Kota Bandung. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang bekerja antara 0 sampai dengan 1 tahun sebesar 4,71%, yang bekerja antara 1 sampai dengan 3 tahun sebesar 10,59%, yang bekerja antara 3 sampai dengan 5 tahun sebesar 4,71`%, dan yang bekerja lebih dari 5 tahun sebesar 80,0%. Jadi responden paling banyak adalah yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

4.3.1 Deskriptif Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja instansi pemerintah pada Dinas di Kota Bandung

Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Agar

lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden di adopsi dari buku Metode Penelitian Bisnis karangan Sugiyono (2009;135) yaitu berdasarkan persentase skor jawaban responden dengan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Skor } = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$$

Keterangan:
Skor ideal = jumlah skor jawaban responden
Skor ideal = jumlah skor maksimum (jumlah responden × jumlah pernyataan × 5)

Selanjutnya persentase skor jawaban responden yang diperoleh dikalsifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum (5/5 =100%) dan skor minimum (1/5 = 20%). Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Kriteria Pengklasifikasian Presentase Skor Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	20.00% – 36.00%	**Tidak Baik/Sangat Rendah**
2	36.01% – 52.00%	**Kurang Baik/Rendah**
3	52.01% – 68.00%	**Cukup Baik/Cukup Tinggi**
4	68.01% – 84.00%	**Baik/Tinggi**
5	84.01% – 100%	**Sangat Baik/Sangat Tinggi**

4.3.2 Analisis Deskriptif Transparansi pada Dinas di Kota Bandung

Transparansi dinas di Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Transparansi diukur menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

A) Kemudahan Akses Informasi

Hasil tanggapan responden mengenai kemudahan akses informasi pada pada Dinas yang ada di Kota Bandung dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Kemudahan Akses Informasi

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Belum tersedianya sistem yang memudahkan untuk akses informasi	F	5	14	22	40	4	231	425	54,4%
		%	5,9	16,5	25,9	47,1	4,7			
2	Informasi kinerja yang memudahkan pengawasan	F	54	25	6	0	0	388	425	91,3%
		%	63,5	29,4	7,1	0,0	0,0			
	Total Indikator							**619**	**850**	**72,8%**

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.2 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator kemudahan akses informasi sebesar 72,8% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya sebagian besar dinas yang ada di Kota Bandung telah memiliki sistem informasi yang mudah untuk diakses. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Ketersediaan sistem informasi yang mudah diakses

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 54,4%, menunjukkan bahwa sistem informasi yang tersedia pada dinas yang ada di Kota Bandung cukup mudah untuk diakses. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden berpendapat masih sulit mendapatkan akses informasi pada dinas yang ada di Kota Bandung cukup mudah untuk diakses.

2. Informasi kinerja memudahkan pengawasan

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 91,3%, menunjukkan bahwa informasi kinerja pada dinas yang ada di Kota Bandung sangat dibutuhkan untuk memudahkan pengawasan. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5, yang berarti paling banyak responden berpendapat informasi kinerja sangat dibutuhkan dalam memudahkan pengawasan.

B) Meningkatkan Arus Informasi

Hasil tanggapan responden mengenai meningkatkan arus informasi pada Dinas yang ada di Kota Bandung melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Meningkatkan Arus Informasi

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Sarana informasi website	F	39	27	17	0	2	**356**	**425**	**83,8%**
		%	45,9	31,8	20,0	0,0	2,4			

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.3 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas indikator meningkatkan arus informasi sebesar 83,8% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya sebagian besar dinas yang ada di Kota Bandung telah meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Kemudian distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5, yang berarti paling banyak responden berpendapat sarana informasi website pada dinas yang ada di Kota Bandung sangat dapat diandalkan untuk meningkatkan arus informasi.

C) Penyediaan Informasi Yang Jelas

Hasil tanggapan responden mengenai penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab pada Dinas yang ada di Kota Bandung dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Penyediaan Informasi Yang Jelas

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
4	Renstra sebagai indikator kinerja yang digunakan untuk SKPD	F	1	0	7	56	21	159	425	37,4%
		%	1,2	0,0	8,2	65,9	24,7			
5	Dokumen RKPD sudah selaras	F	12	38	10	4	21	271	425	63,8%
		%	14,1	44,7	11,8	4,7	24,7			
6	Dokumen RKP/RKT yang berorientasi hasil menunjukan sesuai sasaran	F	7	15	30	9	24	227	425	53,4%
		%	8,2	17,6	35,3	10,6	28,2			
7	Dasar pembuatan dokumen PK	F	33	7	10	34	1	292	425	68,7%
		%	38,8	8,2	11,8	40,0	1,2			
	Total Indikator							**949**	**1700**	**55,8%**

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.4 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas keempat butir pernyataan yang membentuk indikator penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab sebesar 55,8% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya sebagian besar dinas yang ada di Kota Bandung telah menyediakan informasi yang cukup jelas tentang tanggungjawab. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Renstra sebagai indikator kinerja yang digunakan untuk SKPD

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 37,4%, menunjukkan bahwa penggunaan rencana strategi sebagai indikator kinerja pada dinas yang ada di Kota Bandung masih kurang. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden berpendapat rencana

strategi sebagai indikator kinerja pada dinas yang ada di Kota Bandung tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dokumen RKPD sudah selaras

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 63,8%, menunjukkan bahwa dokumen RKPD pada dinas yang ada di Kota Bandung sudah cukup selaras. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 4, yang berarti paling banyak responden berpendapat dokumen RKPD pada dinas yang ada di Kota Bandung sudah selaras dengan RPJM/RKT.

3. Dokumen RKP/RKT yang berorientasi hasil

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 53,4%, menunjukkan bahwa dokumen RKP/RKT yang berorientasi hasil pada dinas yang ada di Kota Bandung sudah cukup sesuai sasaran. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden tidak tahu dokumen RKP/RKT yang berorientasi hasil pada dinas yang ada di Kota Bandung menunjukan sesuai sasaran.

4. Dasar pembuatan dokumen PK

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 68,7%, menunjukkan bahwa dasar pembuatan dokumen PK pada dinas yang ada di Kota Bandung sudah sudah sesuai dengan Renstra. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban

dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden berpendapat pembuatan dokumen PK pada dinas yang ada di Kota Bandung atas dasar RPJM.

D) Menyusun Mekanisme Pengaduan

Hasil tanggapan responden mengenai penyusunan mekanisme pengaduan pada Dinas yang ada di Kota Bandung jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Menyusun Mekanisme Pengaduan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
8	Penyusunan mekanisme peraturan pelanggaran	F	3	11	13	53	5	**209**	**425**	**49,2%**
		%	3,5	12,9	15,3	62,4	5,9			

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.5 dapat dilihat persentase skor tanggapan responden atas indikator penyusunan mekanisme pengaduan sebesar 49,2% dan termasuk dalam kategori kurang baik. Artinya sebagian besar dinas yang ada di Kota Bandung belum membuat mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap. Kemudian distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden berpendapat mekanisme peraturan pelanggaran pada dinas yang ada di Kota Bandung seringkali dilanggar.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran mengenai transparansi secara menyeluruh

pada dinas yang ada di Kota Bandung, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas keempat indikator yang membentuk variabel transparansi.

Tabel 4.6
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Transparansi

Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
Transparansi	F	154	137	115	196	78	**2133**	**3400**	**62,7%**
	%	22,6	20,1	16,9	28,8	11,5			

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Melalui tabel 4.6 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 62,7% termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya keterbukaan dinas yang ada di Kota Bandung kepada masyarakat untuk mengakses informasi cukup tinggi.

4.3.3 Analisis Deskriptif Akuntabilitas pada Dinas di Kota Bandung

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Akuntabilitas dinas di Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Akuntabilitas diukur menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 9 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

A) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Hasil tanggapan responden mengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran pada Dinas yang ada di Kota Bandung dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Merealisasikan sejumlah program SKPD	F	0	0	20	45	20	170	425	40,0%
		%	0,0	0,0	23,5	52,9	23,5			
2	Dalam merealisasikan sejumlah program SKPD memperhatikan prilaku korupsi dan kolusi	F	0	3	12	33	37	151	425	35,5%
		%	0,0	3,5	14,1	38,8	43,5			
	Total Indikator							**321**	**850**	**37,8%**

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.7 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran sebesar 37,8% dan termasuk dalam kategori rendah. Artinya sebagian besar dinas yang ada di Kota Bandung memiliki akuntabilitas hukum dan kejujuran yang rendah. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Merealisasikan sejumlah program SKPD

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 40,0%, menunjukkan bahwa realisasi sejumlah program pada dinas yang ada di Kota Bandung masih rendah. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden berpendapat dalam merealisasikan sejumlah program pada dinas yang ada di Kota Bandung tidak mematuhi hukum.

2. Memperhatikan perilaku korupsi dan kolusi

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 35,5%, menunjukkan bahwa dalam merealisasikan sejumlah program pada dinas yang ada di Kota Bandung belum memperhatikan prilaku korupsi dan kolusi. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 1, yang berarti paling banyak responden berpendapat dalam merealisasikan sejumlah program pada dinas yang ada di Kota Bandung sangat tidak menghindarkan diri dari perilaku korupsi dan kolusi.

B) Akuntabilitas Proses

Hasil tanggapan responden mengenai akuntabilitas proses pada Dinas yang ada di Kota Bandung dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabilitas Proses

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Dalam merealisasikan sejumlah program SKPD memperhatikan proses prosedur	F	0	1	6	33	45	133	425	31,3%
		%	0,0	1,2	7,1	38,8	52,9			
4	Tanggapan warga tidak adanya program yang terrealisasi	F	17	33	30	5	0	317	425	74,6%
		%	20,0	38,8	35,3	5,9	0,0			
5	Warga yang mengeluh yang mencermati realisasi	F	14	29	33	6	3	300	425	70,6%
		%	16,5	34,1	38,8	7,1	3,5			
6	Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan publik terhadap program yang terrealisasi	F	3	28	30	13	11	254	425	59,8%
		%	3,5	32,9	35,3	15,3	12,9			
	Total Indikator							**1004**	**1700**	**59,1%**

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.8 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas keempat butir pernyataan yang membentuk indikator akuntabilitas proses sebesar 59,1% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya sebagian besar dinas yang ada di Kota Bandung telah memiliki akuntabilitas prosess yang cukup baik. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Memperhatikan proses prosedur

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 31,3%, menunjukkan bahwa dalam merealisasikan sejumlah program, dinas yang ada di Kota Bandung masih belum memperhatikan proses prosedur. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 1, yang berarti paling banyak responden berpendapat dalam merealisasikan sejumlah program pada dinas yang ada di Kota Bandung sangat tidak membutuhkan standar operasional prosedur.

2. Tidak adanya program yang terrealisasi

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 74,6%, menunjukkan bahwa masyarakat merespon dengan baik program yang terrealisasi pada dinas yang ada di Kota Bandung. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 4, yang berarti paling banyak responden berpendapat masyarakat responsif terhadap program yang terrealisasi pada dinas yang ada di Kota Bandung.

3. Keluhan masyarakat

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 70,6%, menunjukkan bahwa masyarakat mencermati realisasi program pada dinas yang ada di Kota Bandung. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden berpendapat masyarakat cukup mencermati setiap realisasi program pada dinas yang ada di Kota Bandung.

4. Biaya untuk pelayanan publik

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 59,8%, menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan publik terhadap program yang terrealisasi pada dinas yang ada di Kota Bandung cukup tinggi. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden berpendapat biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan publik terhadap program yang terrealisasi cukup mahal.

C) Akuntabilitas Program

Hasil tanggapan responden mengenai akuntabilitas program pada Dinas yang ada di Kota Bandung dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabilitas Program

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
7	Alternative program yang ada	F	0	2	36	43	4	206	425	48,5%
		%	0,0	2,4	42,4	50,6	4,7			
8	Hasil output yang di pertanggungjawabkan	F	0	0	11	68	6	175	425	41,2%
		%	0,0	0,0	12,9	80,0	7,1			
	Total Indikator							**381**	**850**	**44,8%**

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.9 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator akuntabilitas program sebesar 44,8% dan termasuk dalam kategori rendah. Artinya sebagian besar dinas yang ada di Kota Bandung memiliki akuntabilitas program yang rendah. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Alternative program yang ada

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 44,8%, menunjukkan bahwa ketersediaan alternative program pada dinas yang ada di Kota Bandung masih rendah. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden berpendapat alternative program pada dinas yang ada di Kota Bandung masih belum optimal.

2. Hasil output yang di pertanggungjawabkan

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 41,2%, menunjukkan bahwa hasil output yang dapat dipertanggungjawabkan pada dinas yang ada di Kota Bandung masih rendah. Dari distribusi skor tanggapan

responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden berpendapat hasil ouput pada dinas yang ada di Kota Bandung masih tidak sesuai dengan anggaran.

D) Akuntabilitas Kebijakan

Hasil tanggapan responden mengenai akuntabilitas kebijakan pada Dinas yang ada di Kota Bandung dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabilitas Kebijakan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
9	Tanggapan warga terhadap kebijakan program yang terealisasi	F	0	2	17	50	16	175	425	41,2%
		%	0,0	2,4	20,0	58,8	18,8			

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.10 dapat dilihat persentase skor tanggapan responden atas indikator akuntabilitas kebijakan sebesar 41,2% dan termasuk dalam kategori rendah. Artinya sebagian besar dinas yang ada di Kota Bandung belum memenuhi akuntabilkitas kebijakan. Kemudian distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden berpendapat tanggapan warga terhadap kebijakan program yang terealisasi masih tidak baik.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran mengenai akuntabilitas secara menyeluruh pada dinas yang ada di Kota Bandung, dihitung akumulasi skor tanggapan responden

dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas keempat indikator yang membentuk variabel akuntabilitas.

Tabel 4.11
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Akuntabilitas

Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
Akuntabilitas	F	34	98	195	296	142	**1881**	**3825**	**49,2%**
	%	4,4	12,8	25,5	38,7	18,6			

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Melalui tabel 4.11 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 49,2% dan termasuk dalam kategori rendah. Artinya pertanggungjawaban dinas yang ada di Kota Bandung terhadap masyarakat atas program yang dilaksanakan masih rendah.

4.3.4 Analisis Deskriptif Kinerja Dinas di Kota Bandung

Kinerja dinas yang ada di Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kinerja dinas diukur menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 7 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

A) Input

Hasil tanggapan responden mengenai masukan sumber daya yang digunakan pada Dinas yang ada di Kota Bandung dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Input

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Penilaian kinerja antara anggaran dengan target	F	0	5	13	2	1	64	105	61,0%
		%	0,0	23,8	61,9	9,5	4,8			

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.12 dapat dilihat persentase skor tanggapan responden atas indikator masukan sebesar 61,0% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya sebagian besar dinas yang ada di Kota Bandung memiliki sumber daya masukan yang cukup baik dalam melaksanakan program. Kemudian distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden berpendapat kinerja antara anggaran dengan target cukup tercapai.

B) Output

Hasil tanggapan responden mengenai hasil langsung dari proses pelaksanaan program pada Dinas yang ada di Kota Bandung dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Output

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
2	SKPD belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	F	0	3	15	3	0	63	105	60,0%
		%	0,0	14,3	71,4	14,3	0,0			
3	Kinerja outcome SKPD yang tercantum dalam RPJMD/Renstra, RKPD/RKT, PK	F	0	6	13	2	0	67	105	63,8%
		%	0,0	28,6	61,9	9,5	0,0			
	Total Indikator							**130**	**210**	**61,9%**

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.13 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator outoput sebesar 61,9% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya sebagian besar dinas yang ada di Kota Bandung memiliki hasil yang cukup tinggi dari pelaksanan program. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Dinas belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 60,0%, menunjukkan bahwa dinas yang ada di Kota Bandung pada umumnya cukup memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden berpendapat kriteria indikator kinerja pada dinas cukup sesuai dengan dokumen perencanaan.

2. Kinerja outcome SKPD yang tercantum dalam RPJMD/Renstra, RKPD/RKT, PK.

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 63,8%, menunjukkan bahwa kinerja outcome dinas yang ada di Kota Bandung yang tercantum dalam RPJMD/Renstra, RKPD/RKT, PK sudah cukup tercapai. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden berpendapat kinerja outcome yang tercantum dalam RPJMD/Renstra, RKPD/RKT, PK sudah cukup tercapai.

C) Outcome

Hasil tanggapan responden mengenai pencapaian pelaksanaan program pada Dinas yang ada di Kota Bandung dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Outcome

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
4	Aktifitas pencapaian suatu program dibandingkan dengan target kinerja	F	0	6	14	1	0	68	105	64,8%
		%	0,0	28,6	66,7	4,8	0,0			
5	Aktifitas pencapaian suatu program dibandingkan dengan RPJM	F	1	5	13	2	0	68	105	64,8%
		%	4,8	23,8	61,9	9,5	0,0			
	Total Indikator							**136**	**210**	**64,8%**

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.14 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator outoput sebesar 64,8% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya sebagian besar dinas yang ada di Kota Bandung memiliki pencapaian hasil yang cukup tinggi dari pelaksanan program. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Aktifitas pencapaian suatu program dibandingkan dengan target kinerja

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 64,8%, menunjukkan bahwa dinas yang ada di Kota Bandung pada umumnya memiliki aktifitas pencapaian suatu program yang cukup tinggi dibandingkan dengan target kinerja. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling

banyak responden berpendapat aktifitas pencapaian suatu program cukup sesuai dibandingkan dengan target kinerja.

2. Aktifitas pencapaian suatu program dibandingkan dengan RPJM

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 64,8%, menunjukkan bahwa dinas yang ada di Kota Bandung pada umumnya memiliki aktifitas pencapaian suatu program yang cukup tinggi dibandingkan dengan RPJM. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden berpendapat aktifitas pencapaian suatu program cukup sesuai dibandingkan dengan RPJM.

D) Manfaat dan Dampak

Hasil tanggapan responden mengenai manfaat dan dampak pelaksanaan program pada Dinas yang ada di Kota Bandung dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Manfaat dan Dampak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
6	Efek langsung akibat dari pencapaikan tujuan program	F	1	1	17	2	0	64	105	61,0%
		%	4,8	4,8	81,0	9,5	0,0			
7	Efek tidak langsung akibat dari pencapaikan tujuan program	F	1	3	15	1	1	65	105	61,9%
		%	4,8	14,3	71,4	4,8	4,8			
	Total Indikator							**129**	**210**	**61,4%**

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.15 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator manfaat dan dampak sebesar

61,4% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya sebagian besar dinas yang ada di Kota Bandung memberikan manfaat dan dampak yang cukup tinggi kepada masyarakat dari pelaksanan program. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Efek langsung akibat dari pencapaikan tujuan program

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 61,0%, menunjukkan bahwa efek langsung akibat dari pencapaikan tujuan program dinas yang ada di Kota Bandung cukup tinggi. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden berpendapat efek langsung akibat dari pencapaikan tujuan program cukup dirasakan oleh masyarakat.

2. Efek tidak langsung akibat dari pencapaikan tujuan program

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 61,9%, menunjukkan bahwa efek tidak langsung akibat dari pencapaikan tujuan program dinas yang ada di Kota Bandung cukup tinggi. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden berpendapat efek tidak langsung akibat dari pencapaikan tujuan program cukup bermanfaat bagi masyarakat.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja secara menyeluruh pada dinas yang ada di Kota Bandung, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari

seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas keempat indikator yang membentuk variabel kinerja instansi.

Tabel 4.16
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kinerja

Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
Kinerja	F	8	33	103	15	3	**459**	**735**	**62,4%**
	%	5,4	22,4	70,1	10,2	2,0			

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

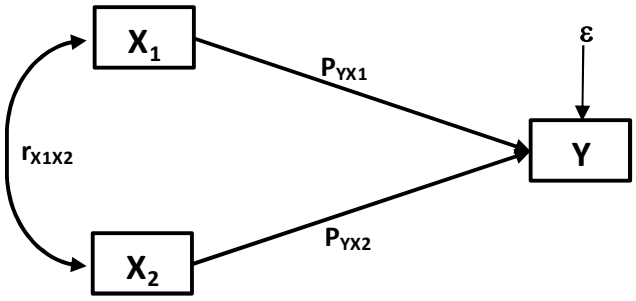
Melalui tabel 4.16 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 62,4% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya kinerja dinas yang ada di Kota Bandung sudah cukup tinggi.

4.4 Analisis Verifikatif

Setelah diuraikan gambaran data variabel penelitian, selanjutnya untuk menguji pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah maka dilakukan pengujian statistik baik secara simultan maupun parsial, namun sebelum data Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Instansi Pemerintah diolah terlebih dahulu dikonversi menjadi data interval menggunakan *Method Succesive Interval*. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, pengujian , Analisis Jalur (*Path Analysis*), koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software *SPSS 18 for windows* dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini :

4.4.1 Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Dinas di Kota Bandung

Pada bagian ini akan diuji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.5 Diagram Jalur Paradigma Penelitian

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam bentuk persamaan struktural sebagai berikut.

$$\mathbf{Y = P_{YX1}X_1 + P_{YX1}X_1 + \varepsilon}$$

Keterangan:
Y = Kinerja instansi pemerintah
X_2 = Akuntabilitas
X_1 = Transparansi
$\mathbf{P_{YX1}}$ = Koefisien jalur transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah
$\mathbf{P_{YX2}}$ = Koefisien jalur akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah
$\mathbf{r_{X1X2}}$ = Koefisien jalur transparansi dengan akuntabilitas
ε = Pengaruh faktor lain

4.4.2 Analisis Korelasi

Analisis korelasi adalah dasar dalam perhitungan analisis jalur, melalui koefisien korelasi akan dihitung koefisien jalur. Namun sebelum menghitung koefisien

korelasi antar variabel, terlebih dahulu dibuat rekap data untuk perhitungan sebagai berikut.

Tabel 4.17
Rekap Data Variabel X_1, X_2, dan Y Untuk Perhitungan Analisis Korelasi

Responden	X_1	X_2	Y	X_1^2	X_2^2	Y_2	X_1X_2	X_1Y	X_2Y
1	2,761	2,578	2,683	7,623	6,646	7,198	7,118	7,408	6,917
2	2,618	2,541	2,765	6,854	6,457	7,645	6,652	7,239	7,026
3	2,720	2,630	2,532	7,398	6,917	6,411	7,154	6,887	6,659
4	2,969	2,583	2,925	8,815	6,672	8,556	7,669	8,684	7,555
5	2,654	2,411	2,499	7,044	5,813	6,245	6,399	6,632	6,025
6	2,861	2,819	3,113	8,185	7,947	9,691	8,065	8,906	8,776
7	2,854	2,354	3,074	8,145	5,541	9,449	6,718	8,773	7,236
8	2,909	2,453	3,074	8,462	6,017	9,449	7,136	8,942	7,541
9	3,065	2,686	3,074	9,394	7,215	9,449	8,233	9,422	8,257
10	2,805	2,406	2,390	7,868	5,789	5,712	6,749	6,704	5,750
11	2,497	2,456	2,699	6,235	6,032	7,285	6,133	6,739	6,629
12	2,600	2,478	2,493	6,760	6,140	6,215	6,443	6,482	6,178
13	2,891	2,284	2,755	8,358	5,217	7,590	6,603	7,965	6,292
14	3,170	2,915	3,605	10,049	8,497	12,996	9,241	11,428	10,509
15	3,091	2,721	3,605	9,554	7,404	12,996	8,411	11,143	9,809
16	2,998	2,779	3,605	8,988	7,723	12,996	8,331	10,808	10,018
17	2,817	2,778	3,605	7,935	7,717	12,996	7,826	10,155	10,015
Jumlah	48,280	43,872	50,496	137,669	113,743	152,880	124,879	144,318	131,191

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan software SPSS 18.0 dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi berikut.

Tabel 4.18

Pedoman Pengklasifikasian Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	0,000 – 0,199	Sangat rendah
2	0,200 – 0,399	Rendah
3	0,400 – 0,599	Sedang
4	0,600 – 0,799	Kuat
5	0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2009:250

Variabel bebas pada penelitian ini adalah transparansi (X_1), dan akuntabilitas (X_2) dan variabel dependen kinerja instansi pemerintah (Y), koefisien korelasi diantara ketiga variabel bebas tersebut dihitung menggunakan rumus berikut.

$$r_{X_1X_2} = \frac{n\sum X_1X_2 - \sum X_1 \sum X_2}{\sqrt{\left[\left(n\sum X_1^2 - \left(\sum X_1\right)^2\right) \times \left(n\sum X_2^2 - \left(\sum X_2\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{X_1X_2} = \frac{17 \times 124,879 - (48,280 \times 43,872)}{\sqrt{\left[\left(17 \times 137,669 - (48,280)^2\right) \times \left(17 \times 113,743 - (43,872)^2\right)\right]}}$$

$$r_{X_1X_2} = \frac{2122,941 - 2118,140}{\sqrt{\left[(2340,371 - 2330,958) \times (1933,639 - 1924,752)\right]}}$$

$$r_{X_1X_2} = \frac{4,801}{\sqrt{9,412 \times 8,886}}$$

$$r_{X_1X_2} = \frac{4,801}{9,146}$$

$$r_{X_1X_2} = 0,525$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara transparansi (X_1) dengan akuntabilitas (X_2) sebesar 0,525. Selanjutnya dihitung koefisien korelasi antara transparansi (X_1) dengan kinerja instansi pemerintah (Y) menggunakan rumus sebagai berikut.

$$r_{X_1Y} = \frac{n\sum X_1Y - \sum X_1 \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X_1^2 - \left(\sum X_1\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{X_1Y} = \frac{17 \times 144,318 - \left(48,280 \times 43,872\right)}{\sqrt{\left[\left(17 \times 137,669 - \left(48,280\right)^2\right) \times \left(17 \times 152,880 - \left(43,872\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{X_1Y} = \frac{2453,400 - 2437,947}{\sqrt{\left[\left(2340,371 - 2330,958\right) \times \left(2598,967 - 2549,846\right)\right]}}$$

$$r_{X_1Y} = \frac{15,453}{\sqrt{9,412 \times 49,121}}$$

$$r_{X_1Y} = \frac{15,453}{21,502}$$

$$r_{X_1Y} = 0,719$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara transparansi (X_1) dengan kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 0,719. Selanjutnya dihitung koefisien korelasi antara akuntabilitas (X_2) dengan kinerja instansi pemerintah (Y) menggunakan rumus sebagai berikut.

$$r_{X_2Y} = \frac{n\sum X_2Y - \sum X_2 \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X_2^2 - \left(\sum X_2\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{X_2Y} = \frac{17 \times 131,191 - (43,872 \times 50,496)}{\sqrt{\left[\left(17 \times 113,743 - (43,872)^2\right) \times \left(17 \times 152,880 - (50,496)^2\right)\right]}}$$

$$r_{X_2Y} = \frac{2230,249 - 2215,361}{\sqrt{\left[(1933,639 - 1924,752) \times (2598,967 - 2549,846)\right]}}$$

$$r_{X_2Y} = \frac{14,888}{\sqrt{8,886 \times 49,121}}$$

$$r_{X_2Y} = \frac{14,888}{20,893}$$

$$r_{X_2Y} = 0,713$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara akuntabilitas (X_1) dengan kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 0,713. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien korelsi antara ketiga variabel tersebut sebagai berikut.

Tabel 4.19
Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.719	.713
	X1	.719	1.000	.525
	X2	.713	.525	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.001	.001
	X1	.001	.	.015
	X2	.001	.015	.
N	Y	17	17	17
	X1	17	17	17
	X2	17	17	17

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara transparansi (X_1) dangan akuntabilitas (X_2) sebesar 0,525 dan masuk dalam

kategori cukup kuat atau cukup erat. Arah hubungan positif antara transparansi dengan akuntabilitas menujukkan bahwa transparansi yang makin tinggi diikuti dengan peningkatan akuntabilitas. Kemudian hubungan antara transparansi (X_1) dengan kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 0,719 termasuk dalam kategori kuat, demikian juga hubungan antara akuntabilitas (X_2) dengan kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 0,713 termasuk dalam kategori kuat juga dengan arah positif.

4.4.3 Perhitungan Koefisien Jalur

Pada diagram jalur dapat dilihat variabel transparansi dan akuntabilitas berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menyusun matriks korelasi antar variabel independen, dalam penelitian ini yang menjadi variabel penyebab adalah transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2).

$$R = \begin{array}{c} \\ X_1 \\ X_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X_1 & X_2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}000 & 0{,}525 \\ 0{,}525 & 1{,}000 \end{bmatrix} \end{array}$$

2) Menghitung invers dari matriks korelasi antara transparansi (X_1) dengan akuntabilitas (X_2).

$$R^{-1} = \begin{array}{c} \\ X_1 \\ X_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X_1 & X_2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}380 & -0{,}725 \\ -0{,}725 & 1{,}380 \end{bmatrix} \end{array}$$

3) Menyusun matrik korelasi antara variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) dengan kinerja instansi pemerintah.

$$R = \begin{array}{c} \\ X_1 \\ X_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0{,}719 \\ 0{,}713 \end{bmatrix} \end{array}$$

4) Selanjutnya untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi antara variabel independen terhadap matriks korelasi variabel independen dengan variabel dependen.

$$\begin{bmatrix} P_{X1Y} \\ P_{X2Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}380 & -0{,}725 \\ -0{,}725 & 1{,}380 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0{,}719 \\ 0{,}713 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P_{X1Y} \\ P_{X2Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}476 \\ 0{,}463 \end{bmatrix}$$

Jadi diperoleh koefisien jalur untuk variabel transparansi sebesar 0,476 dan koefisien jalur variabel akuntabilitas sebesar 0,463. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien jalur transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah sebagai berikut.

Tabel 4.20
Koefisien jalur transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.924	1.105		-2.647	.019
	X1	1.087	.411	.476	2.644	.019
	X2	1.088	.423	.463	2.573	.022

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,476 dan 0,463 pada tabel 4.20 merupakan nilai koefisien jalur transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah.

4.4.4 Perhitungan Koefisien Determinasi

Melalui koefisien jalur yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien determinasi, yaitu besar kontribusi/pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah secara bersama-sama. Koefisien determinasi didapat dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi antara variabel penyebab dengan kinerja instansi pemerintah.

$$R^2_{Y(X_1X_2)} = \begin{bmatrix} 0{,}476 & 0{,}463 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0{,}719 \\ 0{,}713 \end{bmatrix}$$
$$= 0{,}672$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien determinasi transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah sebagai berikut.

Tabel 4.21
Koefisien determinasi transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah

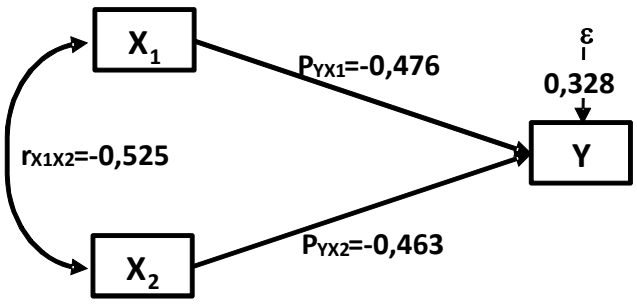
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820[a]	.672	.625	.260295

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Melalui nilai koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel transparansi dan akuntabilitas memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 67,2% terhadap kinerja Dinas di Kota Bandung. Sisanya sebesar 32,8% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel yang sedang diteliti. Secara visual jalur dari variabel independen terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas di Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.6
Diagram Dan Koefisien Jalur

Melalui diagram jalur tersebut dapat dihitung besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Besar pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas di Kota Bandung.

1. Pengaruh langsung transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah $= (P_{YX_1})^2$ = (0,476) x (0,476) = 0,226 **(22,6%).**
2. Pengaruh tidak langsung transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah melalui akuntabilitas = P_{YX_1} x $r_{X_1X_2}$ x P_{YX_2} = (0,476) x (0,525) x (0,463) = 0,116 **(11,6%).**

Jadi total pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas di Kota Bandung **= 22,6% + 11,6% = 34,2%** dengan arah positif. Artinya semakin tinggi transparansi cenderung membuat kinerja instansi pemerintah semakin meningkat.

Besar pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas di Kota Bandung.

1. Pengaruh langsung akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah $= (P_{YX_2})^2$ = (0,463) x (0,463) = 0,214 **(21,4%)**
2. Pengaruh tidak langsung akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah melalui transparansi = P_{YX_2} x $r_{X_1X_2}$ x P_{YX_1} = (0,464) x (0,525) x (0,476) = 0,116 **(11,6%).**

Jadi total pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas di Kota Bandung **= 21,4% + 11,6% = 33,0%** dengan arah positif. Artinya akuntabilitas yang makin tinggi cenderung meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

4.4.5 Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah transparansi dan akuntabilitas memberikan pengaruh yang signfikan terhadap kinerja instansi pemerintah, baik secara bersama-sama maupun secara parsial, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pengujian secara parsial.

- **Pengujian Koefisien Jalur Secara Bersama-sama.**

Hipotesis Statistik:

Ho: $\rho_{YX1} = \rho_{YX2} = 0$ Transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah.

Ha: $\rho_{YX1} \neq \rho_{YX2} \neq 0$ Transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah.

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan uji F dengan formula sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(n-k-1)R^2_{Y(X_1X_2)}}{k(1-R^2_{Y(X_1X_2)})}$$

$$F_{hitung} = \frac{(17\text{-}2\text{-}1)\times 0{,}672}{2\times(1\text{-}0{,}672)}$$

$$= 14{,}324$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh nilai F_{hitung} pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah sebagai berikut.

Tabel 4.22
Uji Anova untuk uji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.941	2	.970	14.324	.000[a]
	Residual	.949	14	.068		
	Total	2.889	16			

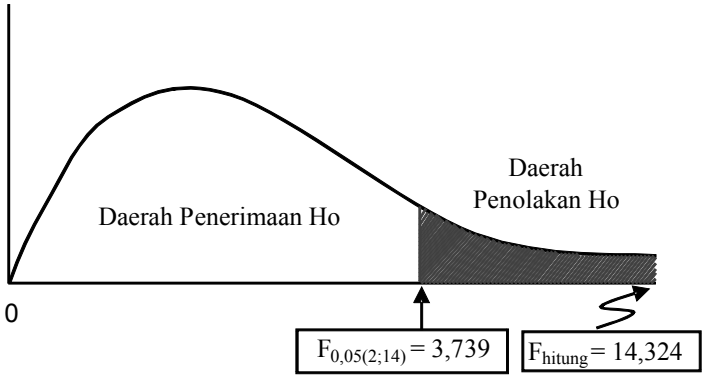
a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel pengujian diatas dapat dilihat nilai F_{hitung} sebesar 14,324 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Selanjutnya dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (2;17-2-1) diperoleh $F_{0.05(2;14)}$ = 3,739. Karena F_{hitung} (14,324) lebih besar dibanding F_{tabel} (3,739) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Dinas di Kota Bandung.

Besarnya kontribusi atau pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama terhadap Kinerja Dinas di Kota Bandung sebesar 67,2%, sedangkan sisanya sebesar 32,8% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel tersebut. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama terhadap kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.7
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena F_{hitung} sebesar 14,324 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas di Kota Bandung.

- **Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial.**

Karena dari hasil pengujian secara bersama-sama menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan, selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial untuk melihat lebih jelas variabel mana saja diantara kedua variabel independen, yaitu transparansi dan akuntabilitas yang pengaruhnya signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Untuk menguji koefisien jalur dari masing-masing variabel eksogen tersebut digunakan uji t, dengan formula sebagai berikut:

$$t_i = \frac{P_{YXi}}{\sqrt{\frac{\left(1-R^2_{Y.X1X2}\right)\times C_{ii}}{\left(n-k-1\right)}}}$$

a) Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Hipotesis:

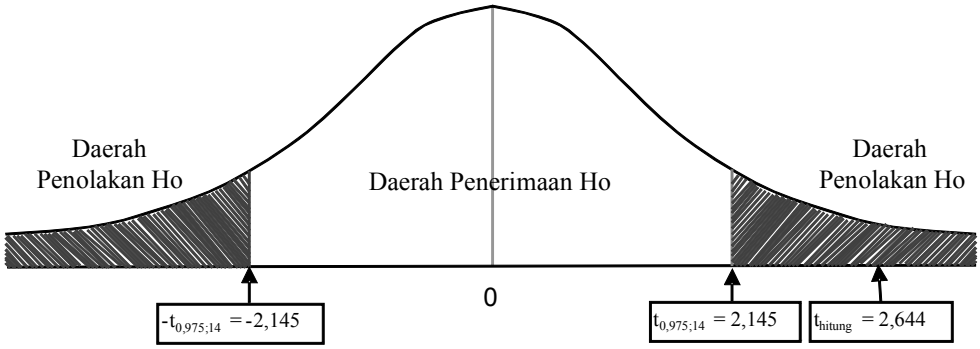
Ho: $\rho_{YX1} = 0$ Transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah

Ha: $\rho_{YX1} \neq 0$: Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah

Statistik uji:

$$t_{hitung} = \frac{0,476}{\sqrt{\frac{(1-0,672)\times 1,380}{(17-2-1)}}} = 2,644$$

Nilai statistik uji t sebesar 2,644 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.20, selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai t dari tabel. Dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 14 diperoleh nilai sebesar 2,145. Karena t_{hitung} (2,644) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,145) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa transparansi secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas di Kota Bandung. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.8
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 2,644 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas di Kota Bandung.

Dari hasil semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi mempunyai tingkat hubungan yang sedang terhadap kinerja dinas di kota Bandung, ditunjukan oleh hasil korelasi sebesar 0,476. Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan menggunakan *SPSS 18.0*, hasilnya adalah transparansi mempunyai pengaruh yang sedang dan signifikan terhadap kinerja Dinas di Kota Bandung.

b) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja instansi pemerintah

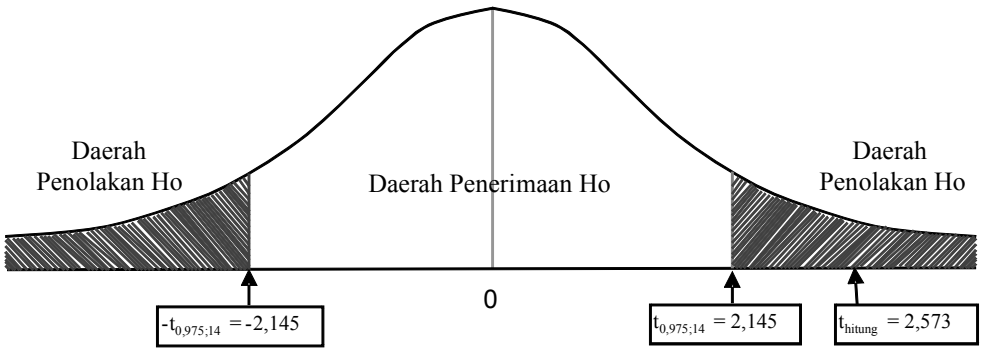
Hipotesis:

Ho: $\rho_{YX2} = 0$ Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah.

Ha: $\rho_{YX2} \neq 0$: Akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah.

Statistik uji: $$t_{hitung} = \frac{0{,}463}{\sqrt{\frac{(1\text{-}0{,}672)\times 1{,}380}{(17\text{-}2\text{-}1)}}} = 2{,}573$$

Nilai statistik uji t sebesar 2,573 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.20, selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai t dari tabel. Dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 14 diperoleh nilai sebesar 2,145. Karena t_{hitung} (2,573) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,145) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Dinas di Kota Bandung. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.9
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 2,573 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas di Kota Bandung.

Dari hasil semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai tingkat hubungan yang sedang terhadap kinerja dinas di kota Bandung, ditunjukan oleh hasil korelasi sebesar 0,463. Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan menggunakan *SPSS 18.0*, hasilnya adalah akuntabilitas mempunyai pengaruh yang sedang dan signifikan terhadap kinerja Dinas di Kota Bandung. Hal tersebut diperkuat oleh teori Menurut (Nita Garnita:2008) yang menyatakan bahwa:

Dalam hasil penelitian dari hasil hipotesis terlihat bahwa terhitung 2,406 lebih besar dari table 2,306 ini berarti dapat di ketahui bahwa terdapat hubungan antara akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah sehingga hipotesis yang di kemukakan “Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah”.